

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam studi hubungan internasional, geopolitik didefinisikan sebagai interaksi antara keadaan geografis dan proses politik yang merupakan kekuatan untuk mengoperasikan level domestik dan internasional yang dapat mempengaruhi perilaku internasional.¹ Geopolitik di Timur Tengah merupakan studi yang menggambarkan hubungan negara-negara di wilayah Timur Tengah, dalam peran dan tujuan politiknya yang saling memperjuangkan kepentingannya terhadap dunia internasional. Hubungan ini juga berlaku sebaliknya, yaitu kepentingan dunia internasional terhadap kawasan Timur Tengah.²

Kondisi geopolitik di Timur Tengah cenderung identik dengan adanya konflik. Konflik dapat berupa permasalahan transnasional dalam berbagai macam aspek, baik itu dari segi keamanan, ekonomi, politik maupun ideologi. Salah satu konflik yang terus mewarnai kondisi geopolitik di timur tengah adalah konflik antara Arab Saudi – Iran. Arab Saudi dengan ideologi Islam sunni sedangkan Iran dengan Islam syiahnya

¹ Semra Rana Gokmen, “*Geopolitics and The Study of International Relations*”, (The Department of International Relations, The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, 2010).

² Ewan W. Anderson, “*The Middle East – Geography & Geopolitics*”, (London: Roudledge, 2000), 23.

merupakan kekuatan utama di kawasan timur tengah sejak jatuhnya Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924.³

Konflik antara Arab Saudi – Iran telah berlangsung dalam beberapa periode. Periode pertama berlangsung pada tahun 1924-1979 yang disebabkan oleh pencaplokan wilayah Khuzistan oleh Iran di bawah pimpinan Reza Shah yang dianggap mengkhawatirkan oleh pemimpin Arab Saudi, Raja Abdul Aziz. Periode kedua berlangsung pada tahun 1979 yang merupakan tahun dimana Revolusi Iran menjadi sebuah negara republik memicu persaingan terhadap doktrin keyakinan dan pandangan tentang Islam yang menantang sistem monarki yang telah lama dianut Arab Saudi. Konflik periode kedua ini kemudian berkembang menjadi perang dingin di wilayah Timur Tengah dan berlangsung hingga tahun 2003. Periode ketiga merupakan fenomena kontemporer yang berlangsung dari tahun 2003 sampai sekarang. Pada periode ini, konflik antara Arab Saudi – Iran diwarnai oleh aspek sektarianisme dimana kedua Negara selalu berada dalam posisi yang berbeda dalam menangani konflik yang muncul di kawasan, mulai dari Perang Irak, Konflik Lebanon, Konflik territorial Palestina – Israel, hingga Konflik Yaman.⁴

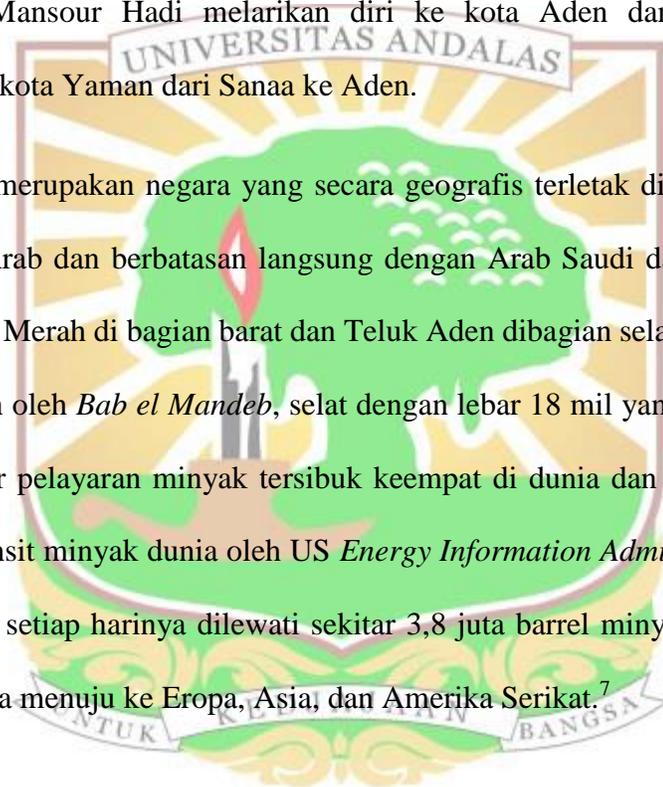
Konflik yang terjadi di Yaman saat ini merupakan puncak dari gejolak yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Diawali dari gelombang *Arab Springs* yang terjadi pada akhir tahun 2010, ikut menyeret Yaman ke dalam pusaran konflik. Dalam

³ Khamami Zada, *Gelombang Revolusi dan Transisi Politik di Timur Tengah dan Afrika Utara*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁴ Tali R. Grumet, *New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran's Rivalry*, University of Denver, 2015.

perkembangannya, konflik Yaman bertransformasi menjadi perang saudara yang semakin besar dan banyak memakan korban. Pada tanggal 21 September 2014, ibukota Yaman, Sanaa, jatuh ke tangan kelompok pemberontak Al Houthi.⁵ Setelah disandera sebagai tahanan rumah selama beberapa pekan oleh pemberontak Houthi, Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi melarikan diri ke kota Aden dan mengumumkan pemindahan ibukota Yaman dari Sanaa ke Aden.

Yaman merupakan negara yang secara geografis terletak di sudut barat daya Semenanjung Arab dan berbatasan langsung dengan Arab Saudi dan Oman. Yaman diapit oleh Laut Merah di bagian barat dan Teluk Aden dibagian selatan. Kedua lautan ini dihubungkan oleh *Bab el Mandeb*, selat dengan lebar 18 mil yang secara ekonomi merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk keempat di dunia dan dianggap sebagai “chokepoint” transit minyak dunia oleh *US Energy Information Administration* (EIA).⁶ *Bab el Mandeb* setiap harinya dilewati sekitar 3,8 juta barrel minyak yang diangkut dari Teluk Persia menuju ke Eropa, Asia, dan Amerika Serikat.⁷



⁵ Bbc.com, *How Yemen's capital Sanaa was seized by Houthi rebels*, <http://www.bbc.com/news/world-29380668>, diakses pada 20 Februari 2018.

⁶ Michael Makovsky, Blaise Misztal, dan Jonathan Ruhe, “*Fragility and Extremism in Yemen, A Case Study of The Stabilizing Fragile States Project*”, Bipartisan Policy Center, 2011.

⁷ Armin Rosen, *War in Yemen could threaten one of the world's most important oil chokepoints*, <http://www.businessinsider.com/war-in-yemen-could-threaten-one-of-the-worlds-most-important-oil-choke-points-2015-3/?IR=T>, diakses pada 20 Februari 2018.

Gambar 1.1 Yaman.



Source: *Yemen Political Map with capital Sanaa, national borders and most important cities. English labeling and scaling. Illustration.*⁸

Secara geopolitik, Yaman berada di bawah pengaruh dua negara hegemon di kawasan yaitu Arab Saudi dan Iran. Hal ini terlihat dari langkah-langkah yang diambil oleh dua negara tersebut dalam menanggapi konflik yang terjadi di Yaman. Dalam melancarkan upaya pemberontakannya, kelompok Houthi mendapat dukungan dari Iran berupa bantuan senjata, finansial serta pelatihan militer.⁹ Indikasi tersebut semakin diperkuat dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat senior Iran yang mengatakan bahwa: *“Yemen is where the real proxy war is going on, and winning the battle in Yemen will help define the balance of power in the Middle East.”*¹⁰

Setelah merasa semakin terdesak oleh pemberontakan yang dilakukan Houthi, pada bulan Maret 2015 Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi memberikan pernyataan sekaligus meminta bantuan kepada negara-negara Arab untuk memproteksi Yaman

⁸ https://www.123rf.com/photo_31491649_stock-vector-yemen-political-map-with-capital-sanaa-national-borders-and-most-important-cities-english-labeling-a.html, diakses pada 20 Februari 2018.

⁹ Reuters, *“Exclusive: Iran steps up support for Houthis in Yemen’s war”*, (March 22nd, 2017).

¹⁰ *Ibid.*

dari upaya penggulingan pemerintahan resmi yang berdaulat, berikut pernyataan Presiden Hadi: “*Yemen would have fallen in four days and would have been an Iranian state had it not been for the Operation Decisive Storm launched by the Arab military coalition under the leadership of Saudi Arabia*”.¹¹

Melalui Menteri Luar Negerinya, Pangeran Saud al Faisal, Arab Saudi mengatakan siap untuk mengambil tindakan militer yang diperlukan untuk mengatasi krisis politik di Yaman. Dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan Inggris, Arab Saudi sebagai pemimpin koalisi militer bekerjasama dengan delapan negara Arab, yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, Maroko, dan Sudan.¹² Pada 25 Maret 2015, Arab Saudi meluncurkan serangan militer besar-besaran ke Yaman untuk memberantas para pemberontak Houthi. Arab Saudi mengerahkan 100 pesawat tempur dan 150 ribu tentara untuk operasi militer ini.¹³

Arab Saudi mengklaim intervensi militer merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan pemerintah Yaman yang sah.¹⁴ Tindakan militer didasarkan pada prinsip pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Intervensi koalisi pimpinan Arab Saudi juga bertujuan untuk mencegah kontrol Houthi terhadap Yaman serta melindungi diri sendiri dan negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) dari

¹¹ *Saudi Arabia and The Yemen Conflict*, (Report: April 2017).

¹² The New York Times, “*Saudi Arabia Leads Air Assault in Yemen*”, (March 25th, 2015). <https://www.nytimes.com/2015/03/26/world/middleeast/al-anad-air-base-houthis-yemen.html>, diakses pada 21 Februari 2018.

¹³ CNN, “*Saudi Arabia launches airstrikes in Yemen*”, (March 26th, 2015). <https://edition.cnn.com/2015/03/25/middleeast/yemen-unrest/>, diakses pada 21 Februari 2018.

¹⁴ *Saudi Arabia and The Yemen Conflict*, (Report: April 2017).

ancaman *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan Al Qaeda di Jazirah Arab (AQAP).¹⁵

Intervensi militer yang dilakukan Arab Saudi ke wilayah Yaman bertolak belakang dengan kebiasaan Arab Saudi yang secara historis hanya terlibat dalam *proxy war*.¹⁶ Berdasarkan sejarahnya, Arab Saudi cenderung untuk menggunakan pihak ketiga dalam merespon konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Seperti pada tahun 1960an, Arab Saudi menggunakan tentara royalis mantan presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, dalam memerangi *Pan Arabism* presiden Mesir ketika itu, Gamal Abdel Nasser. Pada tahun 1980an, Arab Saudi menggunakan Irak yang ketika itu dipimpin oleh Saddam Hussein dalam menghadapi Iran. Pada tahun 1990an, Arab Saudi merespon upaya okupasi Irak terhadap wilayah Kuwait melalui sekutunya, Amerika Serikat.¹⁷

Pada tahun 2011, Arab Saudi melakukan intervensi militer ke wilayah Bahrain yang sedang bergejolak. Intervensi ini merupakan intervensi militer pertama yang dilakukan Arab Saudi ke luar negeri secara langsung.¹⁸ Selama beberapa dekade sebelumnya, Arab Saudi dikenal sebagai negara yang tidak agresif melakukan intervensi mengenai urusan dalam negeri negara lain dan juga tidak bertindak tegas

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ The Guardian, “*Saudi Arabia goes to war*”, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/nov/23/saudi-arabia-yemen-houthi-war>, diakses pada 28 Februari 2018.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muqtedar Khan, “*Saudi Arabia’s Foray into Military Intervention*”, https://www.huffingtonpost.com/muqtedar-khan/saudi-arabias-foray-into-_b_836842.html, diakses pada 28 Februari 2018.

mengenai isu-isu regional.¹⁹ Intervensi Arab Saudi ke Bahrain ditenggarai sebagai bentuk respon dari protes dan pemberontakan yang terjadi di Bahrain merupakan aksi dari warga Syi'ah yang disponsori oleh Iran.²⁰

Intervensi militer Arab Saudi ke Yaman menimbulkan pro dan kontra dalam sistem internasional. Salah satunya adalah tanggapan pemerintah Iran terhadap intervensi tersebut. Kebijakan luar negeri Arab Saudi untuk menyerang Yaman menyebabkan eskalasi konflik di wilayah tersebut meningkat. Secara garis besar konflik ini meluas menjadi pertarungan antara negara-negara muslim Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi dan negara-negara muslim Syiah yang dipimpin oleh Iran.²¹

Intervensi yang dilakukan Arab Saudi ke wilayah Yaman juga diindikasikan sebagai ajang unjuk kekuatan antara Arab Saudi dan Iran yang memiliki ambisi untuk menjadi negara hegemon di kawasan Timur Tengah.²² Rivalitas dua kekuatan ini telah berlangsung sejak lama. Kapabilitas militer dan politik yang kuat di antara negara-negara kawasan lainnya mendorong kedua negara ini untuk menjadikan negara mereka sebagai pemimpin bagi bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah.

Persaingan kekuatan Arab Saudi dan Iran menghasilkan ketidakseimbangan strategis arah politik Timur Tengah. Arab Saudi dan Iran tidak saling berhadapan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ The Guardian, "Saudi Arabian intervention in Bahrain driven by visceral Sunni fear of Shias", <https://www.theguardian.com/world/2011/mar/20/bahrain-saudi-arabia-rebellion>, diakses pada 28 Februari 2018.

²¹ The Washington Post, "How sectarianism shapes Yemen's war", https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/04/13/how-sectarianism-shapes-yemens-war/?utm_term=.37e41f878b1d, diakses pada 21 Februari 2018.

²² Nussaibah Younis, "The Saudi-Iran powerplay behind the Yemen conflict", <http://www.theguardian.com/>, diakses pada 21 Februari 2018.

secara militer, namun membagi kawasan tersebut menjadi dua blok berdasarkan ideologi politik dan agama dalam mencari sekutu regional dan menyebarkan sektarianisme karena mereka terus mengeksploitasi negara-negara lemah di kawasan tersebut menjadi *proxy war* mulai dari konflik di Irak hingga Lebanon.²³

Persaingan strategis dan geopolitik Arab Saudi dan Iran semakin diperumit oleh aspek agama dan ideologi, ketegangan antara kedua negara mewakili dua aspirasi yang berlawanan terhadap kepemimpinan Islam dengan dua sistem politik yang sangat berbeda.²⁴ Arab Saudi mewakili Islam sunni melalui paham Wahhabisme, sedangkan Iran mewakili Islam syiah melalui paham Khomeinisme. Menurut pakar Timur Tengah, persaingan Arab Saudi-Iran telah berubah menjadi “*New Middle East Cold War*” yang berimplikasi penting bagi stabilitas regional.²⁵

Dalam konteks negara, tujuan yang ingin dicapai oleh Arab Saudi adalah menjaga kepentingan nasionalnya dengan menguasai kontrol terhadap ruang politik beserta sumber daya alam dan ekonomi, terutama jalur pelayaran perdagangan minyak yang ada di Yaman, serta berusaha untuk membatasi masuk dan berkembangnya pengaruh Iran di kawasan.²⁶

Kajian geopolitik klasik melihat tindakan negara berdasarkan tiga aspek, yaitu *power*, *interest*, dan *influence*. Sedangkan dalam konteks ini relasi Arab Saudi-Iran

²³ Tali R. Grumet, “*New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran’s Rivalry*”, (University of Denver: August 2015).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Anthony H. Cordesman, “*America, Saudi Arabia, and the Strategic Importance of Yemen*”, (Center for Strategic & International Studies: March 26th, 2015).

juga diwarnai oleh aspek ideologis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep geopolitik postmodern yang menjelaskan tindakan negara berdasarkan tiga indikator, yaitu: *power*, *interest*, dan *perception*. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini berusaha untuk menjabarkan motif tindakan Arab Saudi dalam membendung pengaruh Iran pada konflik Yaman dengan memakai perspektif geopolitik postmodern.

1.2 Rumusan Masalah



Konflik yang terjadi di Yaman saat ini merupakan puncak dari gejolak yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Secara geopolitik, Yaman berada di bawah pengaruh dua negara Hegemon di kawasan Timur Tengah yaitu Arab Saudi dan Iran. Kedua negara memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi konflik Yaman. Pergerakan yang dilakukan Iran dengan mendukung kelompok pemberontak Houthi yang sedang berperang dengan pasukan pemerintah membuat Arab Saudi khawatir akan meningkatnya pengaruh Iran di kawasan sehingga Arab Saudi memutuskan untuk melakukan intervensi militer terhadap Yaman. Tindakan Arab Saudi ini bertentangan dengan *nature* Arab Saudi yang biasanya hanya terlibat dalam perang *proxy*, namun untuk kasus Yaman, Arab Saudi melakukan tindakan secara langsung. Intervensi militer Arab Saudi terhadap Yaman inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian yang akan peneliti lakukan dengan menggunakan pendekatan geopolitik postmodern untuk melihat motif dibalik tindakan Arab Saudi tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis hendak menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Bagaimana intervensi militer Arab Saudi terhadap Yaman pada tahun 2015 sebagai upaya untuk membendung pengaruh Iran di Timur Tengah?**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan intervensi dan motif dibalik tindakan intervensi militer Arab Saudi dalam memanfaatkan posisi Yaman sebagai negara berpengaruh terhadap kedudukan Iran yang merupakan ancaman bagi Arab Saudi dalam mencapai tujuannya di kawasan Timur Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah referensi dalam studi Hubungan Internasional mengenai strategi Arab Saudi di kawasan Timur Tengah.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan aspek geopolitik.



1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis topik penelitian, penulis menggunakan lima kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian.

Kajian pustaka pertama yang penulis gunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fozia Jan dan Shazia Majid yang berjudul “*Yemen Crisis and the Role of Saudi Arabia*”.²⁷ Penelitian ini menjelaskan mengenai peran Arab Saudi dalam krisis yang terjadi di Yaman. Bekerja sama dengan Amerika Serikat, Arab Saudi memiliki pilihan untuk membagi Yaman sebagai alat untuk mengurangi pergeseran strategis dari kemenangan Houthi. Hal ini akan memastikan Arab Saudi dan *Gulf Cooperation Council* (GCC) memiliki titik selatan menuju Samudera Hindia dan Amerika Serikat akan mempertahankan kontrolnya di Teluk Aden.

Selain itu, di dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi sikap masyarakat internasional. Pertama, begitu banyak korban jiwa dimana sebagian besarnya merupakan masyarakat sipil. Kedua, blokade angkatan laut yang dilakukan pasukan koalisi Arab Saudi menggunakan taktik pengepungan secara internal yang bertujuan untuk membatasi pasukan Houthi. Lembaga kemanusiaan mengeluarkan respon terhadap hal ini dengan memberikan peringatan tentang bencana kemanusiaan yang akan datang. Mengingat tingginya biaya

²⁷ Fozia Jan and Shazia Majid. “*Yemen Crisis and the Role of Saudi Arabia*”. *International Journal of Arts and Humanities*. (January 2017).

kemanusiaan maupun biaya fisik yang dikeluarkan terhadap Yaman. Selanjutnya, ancaman yang ditimbulkan oleh adanya kelompok *Al Qaeda in the Arabian Peninsula* (AQAP). AQAP memiliki agenda tersendiri di Yaman yaitu membentuk emirat islam melalui jaringannya Ansar al Syariah.

Penelitian dari Fozia Jan dan Shazia Majid ini membahas mengenai peran Arab Saudi dalam krisis Yaman yang berguna sebagai pedoman bagi peneliti untuk membuat pembahasan di bab selanjutnya.

Kajian pustaka kedua yang penulis gunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Jirajoj Mamadkul yang berjudul “*Saudi Arabia – Iran’s Foreign Policy Crisis: A Case Study of Execution of Saudi Shia Cleric Shaikh Nimr al-Nimr*”.²⁸ Jurnal ini menjelaskan hubungan Arab Saudi – Iran yang telah mengalami konflik berkepanjangan sejak revolusi Iran 1979 semakin memburuk dengan dieksekusinya ulama Syi’ah Himh alim Nimr al-Nimr oleh Arab Saudi. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi hubungan Arab Saudi – Iran: 1) Ketidaksepahaman Sunni-Syi’ah, 2) Persaingan menjadi kekuatan regional di Timur Tengah, 3) Politik di OPEC. Studi menemukan bahwa akar penyebab dari krisis hubungan kedua negara adalah persaingan mereka untuk ambisi menjadi hegemonik di kawasan dan menjadi pemimpin di dunia muslim.

Dampak dari eksekusi tersebut semakin membuat hubungan Arab Saudi dan Iran menjadi tegang,. Arab Saudi dan Negara-negara Teluk memutuskan hubungan

²⁸ Jirajoj Mamadkul, “*Saudi Arabia – Iran’s Foreign Policy Crisis: A Case Study of Execution of Saudi Shia Cleric Shaikh Nimr al-Nimr*”, (Institute of Diplomacy and International Study, Rangsit University, 1 November 2016).

diplomatik dengan Iran sebagai tanggapan atas pembakaran tempat-tempat diplomatik Arab Saudi oleh sekelompok orang Iran. Namun, kecenderungan terhadap perang antara Arab Saudi dan Iran tidak mungkin terjadi karena para pembuat kebijakan tertinggi kedua negara masih bersikap rasional. Mereka menyadari bahwa jika mereka melakukan perang satu sama lain, akan memberikan dampak yang masif dan malapetaka yang tidak hanya di kawasan Timur Tengah tetapi juga diseluruh dunia.

Jurnal ini menganalisis bagaimana krisis tersebut berkembang, mengapa hal tersebut tidak menyebabkan perang atau konfrontasi antara kedua negara, dan apa dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut terhadap rekonsiliasi hubungan Arab Saudi dan Iran.

Jurnal ini juga membantu peneliti dalam memberikan gambaran kondisi hubungan Arab – Saudi Iran yang disertai dengan faktor-faktor penyebab renggangnya hubungan kedua negara. Jurnal ini kemudian juga peneliti gunakan sebagai pedoman dalam membuat pembahasan pada bab selanjutnya.

Kajian pustaka selanjutnya yang penulis gunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Usjid U. Hameed yang berjudul “*The Saudi-Iranian Rivalry: A Foreign Policy Analysis Approach*”.²⁹ Dalam tulisannya, Usjid U. Hameed menggunakan pendekatan *Foreign Policy Analysis* (FPA) dalam melihat persaingan Arab Saudi – Iran. Pendekatan ini berbasis agensi dimana kekhawatiran mengenai kekuatan dan ideologi

²⁹ Usjid U. Hameed, “*The Saudi-Iranian Rivalry: A Foreign Policy Analysis Approach*”, (Towson University Journal of International Affairs).

relatif berfokus pada faktor pembuat kebijakan dalam negeri untuk menyatakan bahwa persaingan dimotivasi oleh isu-isu kekuasaan dan identitas serta politik dalam negeri.

Pertama, pemeriksaan sejarah regional menggambarkan bahwa asal usul identitas anti-elite Iran berasal dari perpecahan Sunni-Syi'ah dan Revolusi Iran. Selanjutnya, artikel tersebut menganalisis hubungan Saudi dan Iran dengan Israel dan Kesepakatan Nuklir Iran dengan menggunakan pendekatan FPA untuk menunjukkan bagaimana Arab Saudi secara konsisten dimotivasi oleh kekuatan dan keuntungan relatif sementara Iran secara konsisten dimotivasi oleh kekuasaan, identitas, dan masalah domestik. Akhirnya, *proxy war* di Irak mencontohkan bagaimana motivasi Arab Saudi untuk mendapatkan kekuatan dan motivasi Iran untuk mendapatkan kekuasaan serta dampak anti-elitenya terhadap negara-negara tetangga.

Kajian pustaka selanjutnya merupakan laporan yang ditulis oleh Jeremy M. Sharp dari *Congressional Research Service* yang berjudul “*Yemen: Civil War and Regional Intervention.*”³⁰ Laporan ini memberikan materi tentang krisis yang sedang berlangsung di Yaman dan respon kebijakan Amerika Serikat. Pada bulan Maret 2015, Arab Saudi dan anggota sebuah koalisi yang didirikannya (koalisi pimpinan Arab Saudi) meluncurkan sebuah operasi militer yang bertujuan memulihkan pemerintahan Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional.

Setelah dua tahun perang, koalisi pimpinan Arab Saudi kemungkinan besar akan melanjutkan negosiasi dari posisi yang kuat. Serangan koalisi saat ini di sepanjang

³⁰ Jeremy M. Sharp. “*Yemen: Civil War and Regional Intervention.*”. (Congressional Research Service: March 21, 2017).

pantai Laut Merah berusaha mengurangi akses maritim ke pasukan Houthi dengan harapan pasukan Houthi terisolasi dan terpaksa membawa kembali ke meja perundingan. Selama tahun terakhir pemerintahan Obama, kebijakan Amerika Serikat terhadap konflik Yaman beralih ke pendekatan yang lebih bernuansa setelah awalnya menekankan dukungan yang kuat untuk kampanye koalisi pimpinan Arab Saudi dan pemulihan pemerintahan Presiden Hadi. Pemerintahan Obama meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan penyelesaian politik secara langsung.

Kajian pustaka selanjutnya yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah skripsi dari Mukhlisa Nur Andini yang berjudul “*Pengaruh Iran Dalam Konflik Yaman (Pasca Arab Springs)*.”³¹ Keterlibatan Iran pada konflik Yaman dilatar belakangi oleh adanya kesamaan ideologi Syi’ah Iran dengan kelompok pemberontak Al Houthi yang berada di Yaman. Motif keterlibatan Iran pada konflik Yaman adalah untuk memperluas pengaruh ideologi Syi’ah di Yaman dan membantu kelompok Houthi yang memiliki kesamaan secara ideologi. Wujud pengaruh Iran terhadap konflik Yaman terlihat dalam dua bidang, yaitu bidang politik dan militer. Dalam bidang politik, Iran berusaha melebarkan pengaruh ideologi Syi’ahnya melalui kudeta oleh kelompok pemberontak Al Houthi di Yaman. Sedangkan dalam bidang militer, pengaruh Iran terlihat dari pengiriman persenjataan dan penasehat militer Iran bagi kelompok Al Houthi di Yaman.

³¹ Mukhlisa Nur Andini. “*Pengaruh Iran Dalam Konflik Yaman (Pasca Arab Springs)*”. (Skripsi: Universitas Hasanuddin). 2016.

Perbedaan penelitian ini dengan “*Pengaruh Iran Dalam Konflik Yaman (Pasca Arab Springs)*” adalah skripsi tersebut melihat pengaruh Iran pada konflik Yaman dari sisi sektarian, terutama pasca *Arab Spring*. Penelitian ini juga menjadikan Iran sebagai unit analisa, sedangkan unit analisa penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Arab Saudi.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Intervensi Militer

Secara umum, terdapat beberapa pengertian istilah intervensi. Intervensi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).³² Intervensi menurut Lauterpacht dalam Huala Adolf, adalah turut campurnya suatu negara dalam sebuah urusan dalam negeri negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan yang bertujuan untuk memelihara atau mengubah keadaan situasi negara tersebut.³³ Wirjono Prodjodikoro berpendapat dalam hukum internasional intervensi tidak memiliki arti luas; sebagai segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan suatu negara, melainkan berartian sempit; yaitu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force*) atau dengan ancaman melakukan kekerasan apabila keinginannya tidak terpenuhi.³⁴

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <http://kbbi.web.id/intervensi>.

³³ Vicky Fabiansyah, 7.

³⁴ Andrew Firdaus Sunarso Putra, “Intervensi terhadap Kedaulatan Suatu Negara Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus tentang : Perang Korea tahun 1950 – 1953)”, Skripsi Universitas Jendral Soedirman, 47.

Dari pengertian tersebut, istilah intervensi dapat dimaknai dalam arti luas yaitu sebagai segala bentuk campur tangan pihak ketiga dengan urusan internal pihak lain, maupun dalam arti sempit yang dimaksud oleh hukum internasional.

Intervensi dapat dikategorikan berdasarkan pihak yang terlibat, bentuk, dan tujuan. Pihak yang terlibat intervensi dapat berupa negara atau organisasi seperti PBB, *Non Governmental Organization* (NGO), maupun organisasi lainnya.³⁵ Intervensi diplomatik adalah intervensi tanpa kekerasan, tanpa pemaksaan, dan bersifat tidak mengikat yang semata adalah kesukarelaan dari pihak ketiga untuk membantu pihak bersengketa dalam mencapai kesepakatan perdamaian.³⁶ Intervensi diplomatik dapat dilakukan dengan mediasi. Becovict dan Wille mengartikan mediasi sebagai sebuah proses manajemen konflik dimana pihak yang bersengketa meminta bantuan atau menerima tawaran bantuan dari individu/kelompok/negara/organisasi untuk menyelesaikan konflik mereka tanpa menggunakan kekuatan fisik.³⁷

Sedangkan intervensi militer yaitu penggunaan senjata militer atau penggunaan tindak kekerasan pada suatu negara oleh satu negara maupun beberapa negara yang dirancang untuk merubah kebijakan pemerintah, bahkan mengganti pemerintahan.³⁸

³⁵ Ibrahim Noor, 1068.

³⁶ Mathieu Couttenier dan Raphael Souberyan, “*Diplomatic Intervention in Civil War : Trade for All or Trade for One?*”, hal 2 <http://www.lameta.univ-montp1.fr/Documents/DR2011-08.pdf>

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Martin Ortega, “*Military Intervention and European Union*”, <http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp045e.pdf> 2.

1.7.2 Deterrence

Konsep deterrence secara umum adalah strategi defensif yang dikembangkan setelah Perang Dunia I dan digunakan selama Perang Dingin. Deterrence bertujuan untuk meyakinkan pihak musuh untuk tidak melakukan tindakan dengan menjelaskan konsekuensi dari tindakan tersebut. Apabila pihak musuh bertindak melewati batas, maka aktor akan mengambil tindakan yang bersifat menghukum.³⁹ Deterrence pada dasarnya bertujuan untuk melindungi status quo.⁴⁰

Dalam konsep ini, aktor berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatannya untuk menangkal serangan dari pihak musuh, atau setidaknya menekan dan memaksa lawan untuk berpikir kembali dalam melakukan serangan.⁴¹ Konsep deterrence dimanifestasikan kedalam sebuah strategi militer yang bertujuan untuk menangkal serangan negara lain atau pihak musuh dengan meningkatkan kemampuan militer baik secara fisik (alutsista) maupun secara non fisik (doktrin militer).⁴²

Menurut Patrick M. Morgan, deterrence adalah sebuah praktek lama dalam politik internasional dan reaksi wilayah lainnya. Glenn Synder mendefinisikan deterrence sebagai kebijakan *stick and carrot*. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang selama ini telah dipraktikkan Amerika Serikat. Kebijakan tersebut mencegah pihak lain untuk memberikan suatu ancaman, dengan cara menjatuhkan sanksi positif berupa

³⁹ Branislav L. Slantchev, *Introduction to International Relations, Lecture 8: Deterrence and Compellence, Department of Political Science, University of California – San Diego, 2005.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ John Baylis & dkk, *Strategy in the Contemporary World*. Oxford University Press, 2002. 161-170.

⁴² *Ibid.*

hadiah jika pihak lain tersebut mentaati apa yang dilarang Amerika dan menjatuhkan sanksi negatif berupa suatu hukuman bagi pihak lain yang berlaku sebaliknya.⁴³

Konsep deterrence ini peneliti gunakan untuk mengidentifikasi tindakan militer Arab Saudi terhadap Konflik Yaman dari ancaman pengaruh Iran di kawasan. Dengan mengidentifikasi tindakan militer Arab Saudi maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara tersebut dapat dijelaskan secara empiris dan rasional.

1.7.3 Threat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, deterrence merupakan respon terhadap *threat* atau ancaman yang diterima oleh suatu negara. Barry Buzan dalam bukunya *People States and Fear* mengkategorikan jenis-jenis ancaman ke dalam lima sektor, yaitu:⁴⁴

- a) Sektor Militer: Merupakan ancaman paling nyata yang mampu menimbulkan kekhawatiran dan mempengaruhi semua komponen negara. Ancaman militer juga dianggap sebagai kewajiban dasar negara untuk melindungi warga negaranya.
- b) Sektor Politik: Merupakan ancaman yang bersifat ambigu dan sulit diidentifikasi serta berkaitan erat dengan ancaman militer. Karena negara merupakan entitas politik, ancaman pada sektor politik juga bertujuan untuk melemahkan entitas tersebut. Contoh: persaingan dalam bentuk ideology.

⁴³ Patrick M. Morgan, *Deterrence Now*, Cambridge University Press, 2003.

⁴⁴ Barry Buzan, *People States and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era, Second Edition*, (Inggris: Harvester Wheatsheaf, 1991), 116-134.

- c) Sektor Ekonomi: Ekonomi berperan penting terhadap keamanan suatu negara karena kemandirian militer akan sangat bergantung dari anggaran belanja negara. Kuat atau lemahnya perekonomian suatu negara akan sangat menentukan kekuatan militer negara tersebut. Kelemahan dalam bidang ekonomi, dapat menjadi jalan bagi bangsa asing untuk mengontrol jalannya pemerintahan melalui bantuan ekonomi.
- d) Sektor Sosial: Merupakan ancaman yang menyerang sektor identitas dan budaya suatu bangsa. Kendala utama yang dihadapi dalam menghadapi ancaman sosial adalah, bahwasanya ancaman tersebut biasanya datang dari dalam negeri sendiri. Diskriminasi serta perbedaan tingkat sosial kehidupan merupakan faktor penting dalam terjadinya ancaman sosial dalam sebuah negara sebelum akhirnya menjadi ancaman politik di jajaran elit pemerintahan.
- e) Sektor Ekologi: Ancaman ekologi bagi keamanan nasional ibarat ancaman militer dan ekonomi yang dapat menghancurkan bentuk dasar suatu negara. Secara tradisional, ancaman ekologi bisa dilihat sebagai ketidaksengajaan, bagian dari kehidupan kondisi alam, dan suatu persoalan dari pokok persoalan bagi agenda keamanan nasional.

Konsep *threat* menurut Buzan ini kemudian peneliti gunakan dalam mengidentifikasi jenis ancaman yang melatarbelakangi tindakan intervensi militer Arab Saudi terhadap konflik Yaman.

1.7.4 Geopolitik Post-Modern

Geopolitik lebih mengacu kepada *High Politics* yang membahas mengenai pembagian dan kontrol terhadap ruang politik yang dipengaruhi oleh sumber daya alam, masyarakat serta lingkungan dalam skala yang lebih luas.⁴⁵ Secara lebih merinci, menurut Bottelier, geopolitik merupakan sebuah turunan dari pendekatan realis dalam hubungan internasional, namun geopolitik tidak hanya fokus kepada kepemilikan kekuasaan seperti halnya dalam pendekatan realisme melainkan fokus mengenai ruang dimana kekuasaan tersebut memainkan perannya.⁴⁶

Terdapat beberapa asumsi-asumsi dasar di dalam pendekatan realisme, yaitu:⁴⁷

- Negara merupakan aktor dominan dalam sistem internasional.
- Sistem internasional merupakan sistem yang anarki.
- Negara berusaha untuk mendapatkan *power* agar dapat bertahan hidup (*survive*) dalam sistem yang anarki.
- Hubungan suatu Negara dengan Negara lain merupakan hubungan kekuatan (*power relations*) satu sama lain.

⁴⁵ Simon Dalby, "Geopolitics", Carleton University, Ottawa, Canada (Encyclopedia of Life Support System EOLSS), <http://www.eolss.net/sample-chapters/c14/e1-35-01-03.pdf>, diakses pada 13 Maret 2018.

⁴⁶ Bottelier, 35.

⁴⁷ John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens, "*The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations*", (Oxford University Press, 2008), 90.

Sedangkan dalam geopolitik, terdapat beberapa konsep-konsep dasar seperti Negara, *power*, dan geografi,⁴⁸ dimana:

- Negara dalam geopolitik dipercaya sebagai sebuah entitas politik tertinggi yang dapat mencapai kepentingan nasionalnya (*power*) dengan cara bersaing dengan Negara lain.
- *Power* dilihat berdasarkan kepada lokasi geografis, jumlah populasi, dan sumber daya alam.

Geopolitik didefinisikan sebagai analisis interaksi antara keadaan geografis dan proses politik dalam hubungan internasional.⁴⁹ Keadaan geografis merupakan pola dan bentuk geografi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sedangkan yang dimaksud dengan proses politik merupakan kekuatan yang mengoperasikan level domestik dan internasional yang dapat mempengaruhi perilaku internasional.⁵⁰

Geopolitik awalnya muncul pada rentang abad ke-19 dan abad ke-20 yang diinisiasi oleh pemikiran Fredrich Ratzel (1844-1904) yang mengatakan bahwa setiap Negara memiliki suatu konsep ruang dan kontrol terhadap suatu wilayah.⁵¹ Menurut Ratzel, Negara memerlukan tambahan ruang untuk mencukupi kebutuhan

⁴⁸ Semra Rana Gokmen, *Geopolitics and The Study of International Relations*”, (The Department of International Relations, The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University: August 2010). 158.

⁴⁹ Gokmen, 14.

⁵⁰ Saul Bernard Cohen, *“Geopolitics, The Geography of International Relations”*, (Third Edition, Rowman & Littlefield, 2015). 16.

⁵¹ Andrew Gyorgy, *“Geopolitics, the New German Science”*, (1944). 152

perkembangan masyarakat, dan faktor ruang berpengaruh signifikan terhadap upaya Negara tersebut untuk bisa *survive* dalam tatanan internasional.⁵²

Pemikir geopolitik selanjutnya adalah Alfred T. Mahan yang menganalisis mengenai pengaruh geografis (laut) terhadap hubungan internasional. Menurut Mahan, daerah melintang yang menghubungkan teluk panama dan terusan Suez merupakan kunci untuk mendapatkan kekuatan di dunia.⁵³ Selanjutnya, Halford J. Mackinder dengan karyanya yang berjudul *The Geopolitical Pivot of History* melakukan pendalaman terhadap analisis Mahan dengan memasukkan aspek topografi dan kepadatan penduduk, sedangkan Mahan hanya focus kepada aspek kelautan.⁵⁴

Pemikir geopolitik lainnya yaitu Nicholas J. Spykman dalam bukunya *The Geography of the Peace*, Spykman mengatakan bahwa untuk mendapatkan kontrol dunia, Negara harus dapat menguasai rimland. Rimland merupakan daerah penting yang meliputi daerah Eropa kecuali Rusia, Asia, dan Timur Tengah. Hal tersebut disebabkan oleh populasi, kekayaan sumber daya, dan penggunaan jalur laut.

Studi geopolitik klasik menggunakan istilah model analisis geopolitik untuk menggambarkan dasar geopolitik dari kekuatan nasional. Geopolitik saat ini merupakan konsep yang mengacu pada sejumlah besar isu dalam studi Hubungan Internasional dan kerangka teoretisnya. Dalam dunia yang saling tergantung dan saling

⁵² *Ibid.*

⁵³ Bottelier, Hal. 28

⁵⁴ *Ibid.*

berubah secara luas yang ditandai oleh kompleksitas yang ekstrem, perspektif geopolitik dapat sangat berguna untuk menggambarkan sistem internasional.

Geopolitik klasik abad ke-19 dan awal abad ke-20 menganggap bahwa geopolitik dapat menggambarkan secara netral dan lengkap tentang “bagaimana dunia bekerja”. Menurut Colin Flint, mereka membuat klaim keraguan tentang objektivitas historis dan teoritis untuk mendukung pandangan bias mereka sendiri tentang bagaimana negara mereka harus bersaing di dunia. Namun pandangan geopolitik semacam ini dianggap tidak lagi *up to date*. Setiap klaim untuk dapat melihat pola politik secara global, langsung, dengan benar, terbatas dan bias karena berdasarkan kepada pengetahuan situasional.⁵⁵

Menurut Bruno de Almeida Ferrari, geopolitik merupakan studi tentang politik internasional yang dilihat dari sudut pandang spasial atau geosentris. *Political Geography* menghubungkan antara interaksi faktor geografis dengan politik, interaksi antara ruang dan kekuatan politik, geopolitik mencoba untuk memberikan interpretasi geografis dan mempelajari aspek geografis dari fenomena politik.⁵⁶ Geopolitik postmodern tidak lagi berupa analisis dari studi geografi melainkan studi hubungan internasional.

Studi geopolitik modern mencoba menghindari sebuah tren dalam geopolitik yang menyatakan bahwa geografi sebagai faktor yang menentukan kebijakan Negara

⁵⁵ Constantin Hlihor, “*Geopolitics, From a Classical to a Postmodern Approach*”.

⁵⁶ Bruno de Almeida Ferrari, “*Some Considerations About the Methods and the Nature of Political Geography and Geopolitics*”. http://www.ciari.org/investigacao/Politicalgeo_geopolitics.pdf, diakses pada 13 Maret 2018.

dalam hubungan internasional kontemporer.⁵⁷ Paradigma geopolitik dapat membantu menguraikan indikator spesifik yang dapat menjadi alat dalam mengamati dan mengidentifikasi perilaku aktor di bidang geopolitik.⁵⁸

Perilaku Negara dalam hubungan internasional kontemporer dapat diamati dan diidentifikasi dengan menggunakan paradigma geopolitik yang terdiri dari empat indikator, yaitu:⁵⁹

- **Power**

Konsep power selalu menjadi konsep sentral dalam studi hubungan internasional dan telah didefinisikan dan dijelaskan dalam berbagai cara. Salah satu definisi paling komprehensif yang bisa diaplikasikan dalam studi hubungan internasional adalah definisi dari Rosen dan Jones yang mendefinisikan power sebagai kemampuan bagi aktor internasional yang menggunakan sumber daya *tangible* dan *intangible* serta aset-aset yang ada melalui beberapa cara seperti mempengaruhi sistem internasional dengan tujuan meningkatkan kepuasan atau kepentingan aktor tersebut dalam sistem.⁶⁰

Menurut pandangan kaum realis, para *stakeholder* Negara maupun non Negara harus menggunakan *hard power* dalam mempromosikan kepentingannya terhadap para aktor lain. Sehingga penggunaan *power* secara mekanis dalam menghadapi lawan dianggap sah. Dalam upaya mendapatkan kepentingan nasional, Negara harus berjuang

⁵⁷ Hlihor, 170.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Steven J. Rosen & Walter S. Jones, “*The Logic of International Relations*”, (Massachusetts: 1997), 182.

untuk meningkatkan kekuatannya dan melakukan upaya *balance of power* yang menguntungkan dari arena internasional.

Persaingan dalam perebutan pengaruh merupakan sifat alami dari aktor klasik/Negara dalam geopolitik. Hal ini dilakukan untuk memaksakan cara pandang ataupun kepentingan aktor tersebut baik dalam aspek ekonomi maupun pada sektor persaingan lainnya.⁶¹ *Power* dapat didefinisikan dengan menggunakan rumus relasional berikut: aktor A (Negara/non-negara) memiliki kemampuan untuk memaksa aktor B melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Artinya, A dapat mengontrol B untuk memaksakan kemauan dan nilai politis, citra, dan aspirasinya terhadap dunia.⁶² Jenis aktor ini memiliki kemampuan untuk membuat norma dan peraturan di kancan internasional dan memaksakan aturan tersebut pada sistem internasional. Aktor tersebut juga mampu untuk mengubah norma, peraturan, dan hukum yang mengatur tentang perilaku aktor di bidang geopolitik demi mencapai kepentingan terbaiknya.

- ***Interest***

Menurut Henry Kissinger dan Robert Art, identifikasi terhadap kepentingan nasional sangatlah penting untuk pengembangan strategi dan kebijakan para *stakeholder* Negara maupun non-negara. Kepentingan nasional juga berperan dalam menentukan jenis dan jumlah kekuatan nasional yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi atau kebijakan yang telah dirancang.⁶³

⁶¹ Steven Lukes, "*Power: A Radical View*", (McMillan, London: 1974), 34.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Apud, Alan G. Stolberg, "*Crafting National Interests in the 21st Century*", Disampaikan dalam konferensi *International Studies Association West* di San Fransisco, California pada tanggal 28-29 September 2007.

Menurut cara pandang realis, kepentingan nasional merupakan alat bagi para *stakeholder* yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi apa kepentingan utama suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain. Kata “utama” didefinisikan sebagai kekuasaan dan keamanan.⁶⁴

Berdasarkan sudut pandang geopolitik postmodern, kepentingan terdiri dari tiga tingkatan berdasarkan interaksi dan persaingannya, mulai dari kepentingan tingkat global, regional, hingga lokal. Kepentingan menjadi alat untuk mengukur dan mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat keterlibatan aktor dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah tertentu. Berdasarkan sudut pandang ini, James Rosenau menyimpulkan bahwa terdapat dua jenis kepentingan. Pertama, kepentingan sebagai alat analisis yang digunakan para peneliti dalam mengulas fenomena politik kontemporer. Kedua, sebagai instrument aksi politik yang digunakan sebagai alat untuk bertindak oleh para *stakeholder* dalam menyarankan, menyalahkan, ataupun membenarkan sebuah kebijakan.⁶⁵

Dalam geopolitik terdapat dua unsur yang relevan dalam menetapkan dimensi kepentingan, yaitu sifat aktor dan sifat geopolitik. Dari sudut pandang aktor, kepentingan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan internasional dan dapat berupa kepentingan nasional, ekonomi, politik, territorial, ideologis, dan strategis. Sedangkan dalam analisis geopolitik, kepentingan

⁶⁴ Constantin Hlihor, *Geopolitics and Geostrategy*, 223.

⁶⁵ Hlihor, 200.

didasarkan pada prioritas yang telah diidentifikasi oleh *stakeholder* dalam menentukan perilaku mereka dalam hubungan internasional.⁶⁶

Apabila suatu Negara berusaha untuk melampaui sumber daya (militer & ekonomi) maka secara geopolitik hal tersebut bertujuan untuk: Pertama, menjadi *hegemony interest* yang merupakan upaya imperialistik dalam perspektif hubungan internasional. Kedua, kepentingan untuk melestarikan status quo, yang berupaya untuk mempertahankan *power* dan strukturnya.⁶⁷

- **Perception**

Persepsi merupakan bagian penting dari fenomena geopolitik kontemporer dan merupakan alat yang lazim dipakai dalam menganalisis persaingan ataupun kerjasama antar aktor dan wilayah kepentingan bersama. Dalam teori geopolitik, persepsi mendorong para *stakeholder* untuk melakukan negosiasi maupun sengketa terhadap kontrol wilayah tertentu untuk mendukung kebijakan luar negeri. Persepsi berisikan seperangkat informasi yang membentuk *image* para aktor dalam bidang geopolitik dalam bentuk *mental map*.⁶⁸

Pada tingkat individu, persepsi dipengaruhi oleh lingkungan dan pengetahuan yang berisikan nilai filosofis, moral, politik, budaya dan spiritual yang dikeluarkan oleh para aktor berdasarkan *mood* dan motif.⁶⁹

⁶⁶ *Ibid*, 202.

⁶⁷ *Ibid*, 208.

⁶⁸ *Ibid*, 213.

⁶⁹ *Ibid*, 214.

Menurut Attila Marjan, penelitian geopolitik postmodern menggunakan persepsi sebagai alat analisis dalam memahami perkembangan politik internasional, baik itu persaingan geopolitik tingkat regional maupun global.⁷⁰ Dari segi signifikansi, persepsi dalam geopolitik berisikan unsur-unsur informasi, kognisi, ideologi, agama, norma, kepercayaan, sikap, pendapat dan *image* yang berupa representasi sosial. Hal ini juga berlaku dalam politik internasional terutama dalam hal representasi geopolitik karena *image* menentukan jenis perilaku aktor bidang kepentingan politik.

Persepsi dapat digunakan sebagai cara pandang dalam mengidentifikasi persaingan dan kerjasama antara dua aktor atau lebih yang bersengketa terhadap kepentingan mereka masing-masing di wilayah geografis tertentu. Persepsi merupakan cara untuk melihat, memahami dan menafsirkan persaingan ataupun kesepakatan antara dua aktor di wilayah yang diperebutkan.⁷¹

Dalam geopolitik, persepsi harus dipahami dan didefinisikan dari ruang lingkupnya berdasarkan observasi yang dilakukan subjek (diplomat, pakar, analis, jurnalis, dll). Dengan begitu, setidaknya terdapat tiga jenis persepsi yang akan muncul, yaitu:⁷²

a) *A reality-based perception.*

Persepsi berdasarkan kenyataan, berisikan ketidakmampuan yang berbeda dalam hubungannya dengan realitas geopolitik sesuai dengan kualitas dan

⁷⁰ Attila Marjan, “*The Middle of the Map. Geopolitics of Perceptions*”, (John Harper Publishing: 2011).

⁷¹ Hlihor, 219.

⁷² Hlihor, 221.

kuantitas informasi yang diterima *observer*. Kesalahan persepsi bisa terjadi namun tidak secara disengaja.

b) *A distorted-perception.*

Persepsi menyimpang yang terdistorsi oleh pengaruh nilai dalam masyarakat tertentu (wilayah budaya dan peradaban) dan diterima oleh *observer*.

c) *A diffuse-perception.*

Persepsi yang tersebar pada tingkat opini publik, umumnya ditentukan oleh media, tetapi juga oleh *stereotype* dan fiksasi psikoanalisis serta sejarah.

Ketiga jenis persepsi ini sering ditemukan dalam realitas geopolitik. Para aktor geopolitik memandang kenyataan dan kepentingan, membangun *image* yang kemudian digabungkan dengan kualitas informasi mengenai sumber daya, keuntungan ekonomi dan strategis yang ditawarkan suatu wilayah.

- ***The Influence of Ideas, Power and the Core Values***

Perilaku individu dalam masyarakat maupun perilaku Negara dalam politik internasional diatur oleh hukum dan norma. Hukum dan norma dibangun, diterima bahkan dipaksakan melalui gagasan dan serangkaian nilai-nilai internasional, regional atau lokal. Dengan demikian, aktor geopolitik selalu bertindak dalam ruang ganda yang terdiri dari realitas fisik dan geografis serta realitas yang dibangun secara sosial dalam bentuk tatanan internasional.

Political value, moral dan etika yang mendominasi setiap era bersejarah dalam perkembangan masyarakat internasional merupakan titik awal dari perundingan para *stakeholder* politik internasional dalam upaya mereka untuk menciptakan serangkaian

prinsip dan norma untuk menghasilkan tatanan dunia. *Political value* dapat berupa hasil dari negosiasi dari aktor internasional, sedangkan moral dan norma tidak, karena dianggap tidak memiliki arti universal.⁷³

Dari keempat indikator yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu *power*, *interest*, *perception*, dan *the influence of ideas, power and the core values*, peneliti menggunakan tiga indikator pertama dalam menganalisa motif tindakan intervensi militer Arab Saudi terhadap konflik Yaman. Sedangkan indikator keempat tidak peneliti gunakan karena keterbatasan sumber data dan referensi mengenai konsep tersebut.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁴ Disamping itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis, dimana tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai kejadian spesifik yang dialami oleh individu maupun suatu kelompok.⁷⁵

Penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi kontemporer, penelitian ini berfokus pada kondisi, praktek, struktur dan perbedaan atau hubungan yang ada, opini serta proses

⁷³ *Ibid*, 236.

⁷⁴ Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, "*Qualitative Research For Education: An Introduction to Theories and Methods*". (Second Edition: 1992).

⁷⁵ Vickie A. Lambert, Clinton E. Lambert, *Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design*, 2.

yang sedang berlangsung atau menjadi trend pada waktu tertentu.⁷⁶ Sedangkan penelitian deskriptif analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi serta penjelasan tentang kondisi semata, namun juga melibatkan proses identifikasi dan interpretasi dari data-data yang telah dideskripsikan sebelumnya.⁷⁷

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis ini nantinya peneliti akan mengumpulkan data dan informasi terkait motif intervensi militer Arab Saudi terhadap Konflik Yaman, data tersebut kemudian dideskripsikan menjadi sebuah deskripsi yang jelas dan selanjutnya analisa dan identifikasi terhadap deskripsi data tersebut, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini adalah deskripsi, analisa dan identifikasi kebijakan intervensi militer Arab Saudi terhadap Konflik Yaman dalam membendung pengaruh Iran di Timur Tengah.

1.8.1 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan pada intervensi militer Arab Saudi terhadap konflik Yaman sebagai upaya dalam membendung pengaruh Iran di Timur Tengah. Batasan waktu dari penelitian ini adalah dari tahun 2015-2017, pemilihan batasan waktu ini berdasarkan bahwa pada tahun 2015 merupakan waktu terlibatnya Arab Saudi secara langsung dalam Konflik Yaman, sedangkan batasan akhir penelitian adalah tahun 2017 karena menjadi periode konflik dengan intensitas yang sangat tinggi antara tentara koalisi Arab Saudi dengan kelompok pemberontak Al Houthi.

⁷⁶ Descriptive Reseach, http://www.mu.ac.in/myweb_test/Research%20Methodology-Paper-3/Chapter-5.pdf, diakses pada 13 Maret 2018.

⁷⁷ *Ibid.*

1.8.2 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dan diramalkan sebagai akibat dari variabel lain.⁷⁸ Variabel yang dapat mempengaruhi perilaku variabel dependen atau unit analisa disebut dengan variabel independen atau unit eksplanasi.⁷⁹ Tingkat analisa merupakan unit yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan tersebut.

Dari penjelasan di atas, unit analisa dalam penelitian ini yaitu Negara. Negara yang menjadi unit dalam penelitian ini adalah Arab Saudi yang perilakunya hendak dijelaskan. Sementara itu, unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah Yaman di kawasan Timur Tengah dengan tingkat analisa yaitu negara/kawasan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan studi pustaka yang umumnya merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut peneliti dapatkan melalui studi literatur (*library research*) yang terdapat dalam beberapa sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, website, majalah, media elektronik maupun dokumen-dokumen terkait dengan isu yang dibahas peneliti.⁸⁰

⁷⁸ Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi", Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES, 110.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid*, 7.

1.8.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data merupakan proses keberlanjutan yang membutuhkan penelusuran data-data yang telah didapatkan secara mendalam. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.⁸¹

Dalam mengolah data, peneliti akan memilah-milah informasi yang didapatkan dengan seksama dan akan memilih sumber-sumber yang relevan sehingga dapat menjelaskan isu yang dibahas peneliti. Setelah mendapatkan data-data yang relevan, selanjutnya peneliti akan menyusun data-data tersebut secara terstruktur agar dapat memudahkan penulis untuk menjawab serta menganalisis studi yang sedang dikaji.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Pendahuluan akan memberikan gambaran keseluruhan tentang permasalahan penelitian yang diteliti.

⁸¹ Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research 3e* (California: Sage Publications Inc, 1999), 150.

BAB II Konflik Yaman dan Intervensi Militer Arab Saudi Tahun 2015

Pembahasan pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang dan sejarah konflik Yaman serta aktor-aktor yang berperan dalam konflik tersebut. Pada bab ini juga dijelaskan tentang tindakan intervensi militer Arab Saudi ke Yaman tahun 2015.

BAB III Posisi Strategis Yaman Bagi Iran dan Arab Saudi

Bab ini berisikan deskripsi mengenai posisi strategis Yaman bagi Iran dan Arab Saudi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari masing-masing Negara tersebut.

BAB IV Analisis Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Sebagai Upaya Pembendungan Pengaruh Iran di Timur Tengah.

Pembahasan dalam bab ini peneliti mengidentifikasi tindakan intervensi militer Arab Saudi dalam membendung pengaruh Iran di Timur Tengah serta mengenai motif intervensi militer yang dilakukan Arab Saudi terhadap Konflik Yaman dengan menggunakan konsep Deterrence dan Geopolitik Postmodern yang menggunakan tiga indikator (*power, interest, dan perception*).

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang peneliti berikan terkait penelitian kepada *stakeholder* maupun peneliti selanjutnya.